

## REKOMENDASI TENTANG KEBIJAKAN TERHADAP KEBUTUHAN JASA PENGEMBANGAN USAHA (BDS) DALAM PENYELENGGARAAN PNPM MANDIRI PERDESAAN

- Penerapan ketentuan dasar “Open Menu” membawa implikasi pada luasnya bidang yang ditangani oleh PNPM Mandiri Perdesaan (Ekonomi, Pendidikan, kesehatan dan lainnya);
- Penanganan pada seluruh aspek tersebut kurang optimal karena hanya menyentuh aspek tertentu saja seperti : a) **Ekonomi : membangun sarana prasarana dan pemberian modal usaha**; b) Pendidikan : membangun gedung sekolah, peralatan belajar, buku –buku, beasiswa dan honor guru; c) Kesehatan : membangun gedung (polindes, pustu, posyandu) dan peralatan pendukung;
- Berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi perdesaan, data statistik di Kabupaten Timor tengah Selatan –bahkan di propinsi NTT- sampai dengan Tahun 2009 menunjukkan bahwa tren perekonomian selalu didominasi oleh sektor pertanian, untuk itu dibutuhkan adanya pengayaan aspek dalam menerapkan ketentuan dasar “open menu” pada PNPM Mandiri Perdesaan. Hal ini karena pengembangan usaha tani di Kabupaten Timor Tengah Selatan dihadapkan pada kompleksitas permasalahan yang pelik dimana pola budidaya masyarakat Petani yang masih subsisten dan tingkat risiko investasi di bidang pertanian yang relatif tinggi (karena pengaruh iklim, fluktuasi harga, pasar dll);
- Salah satu pengayaan aspek yang menjadi kebutuhan dan telah diujicobakan oleh masyarakat Petani di tiga (3) Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah aspek penguatan kapasitas petani melalui penyelenggaraan konsep *Business Development Service* (Jasa Pengembangan Usaha). Dalam strategi penanggulangan kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan, Menkokesra sebenarnya telah memasukkan konsep BDS sebagai salah satu pilar dalam mengembangkan usaha kecil;



Gambar 1: BDS sebagai salah satu pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan

- Pelaksanaan konsep BDS merupakan salah satu strategi pengembangan kerjasama seperti yang diharapkan dalam **Tujuan Khusus PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan PTO Tahun 2008 (Butir ke-G) yaitu: “Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan”.**
- Sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan di bidang ekonomi maka merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk mendorong kinerja **sektor pertanian** sebagai **pilar perekonomian** di Kabupaten Timor Tengah Selatan –dan Propinsi NTT-. Kemampuan sumber daya Petani dalam mengelola potensi pertanian merupakan isu strategis dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk itu, direkomendasikan kepada **Pengambil Kebijakan dan Pelaku Kunci PNPM Mandiri Perdesaan** untuk :



## **REKOMENDASI #1**

### **BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KONSEP BDS / BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE**

1. Memperkaya teknik dan metode fasilitasi perencanaan partisipatif yang dapat mendorong kesadaran masyarakat Petani untuk mengusulkan alternatif kegiatan yang mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan dalam hal pengembangan usaha tani sebagai pilar perekonomian di Kabupaten TTS, misalnya: dalam hal penyediaan ragam layanan penguatan kapasitas (dalam bentuk lokakarya, pelatihan, studi banding, dll);
2. Memfasilitasi penyusunan alternatif usulan yang dimaksud dalam butir 1 ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
3. Paket alternatif usulan kegiatan penguatan kapasitas dalam pengembangan usaha tani yang dimaksud adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - Teknik budidaya dan teknologi tepat guna
  - Akses Pemasaran;
  - Sistem Informasi Pasar
  - Kewirausahaan
  - Manajemen keuangan usaha tani
  - Manajemen kelembagaan usaha
  - Ketersediaan sarana produksi tani (saprodi)
  - Ketersediaan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian
4. Mendesain dan menyediakan dokumen kebijakan dan instrumentasi pendukung (panduan, Form, F.A.Q, dll) berkaitan dengan proses dan mekanisme kegiatan penyediaan jasa pengembangan usaha (non-fisik) secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat Petani.

## **REKOMENDASI #2**

### **BERKAITAN DENGAN MEKANISME PENYELENGGARAAN BDS/BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE**

5. Merumuskan desain penjangkaran minat yang lebih efisien dan efektif bukan hanya untuk Lembaga /Individu profesional calon BDSP baik pada lingkup Lokal, Regional dan Nasional;
6. Menetapkan standar penilaian awal terhadap kelayakan Lembaga dan Individu profesional calon BDSP (siapa yang melakukan penilaian, administrasi dokumen, penilaian data dokumen profil lembaga/individu, wawancara, dan kunjungan dan lainnya);
7. Merumuskan mekanisme penyusunan ToR/proposal dan *Aanwijzing* yang efektif sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh pemanfaat (kelompok tani/kelompok usaha kecil) kepada calon BDSP;
8. Mendesain dan menyediakan dokumen kebijakan dan instrumentasi pendukung (panduan, Form, F.A.Q, dll) berkaitan dengan proses dan mekanisme kegiatan penyediaan jasa pengembangan usaha (non-fisik) secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat Petani.

## **REKOMENDASI#3**

### **BERKAITAN DENGAN MEKANISME PANDE (PEMANTAUAN & EVALUASI) DALAM PENYELENGGARAAN KONSEP BDS/BUSINESS DEVELOPMENT SERVICE**

Pemantauan dan evaluasi merupakan pengumpulan informasi baik kuantitatif dan kualitatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas guna mencapai tujuan penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini juga mencakup umpan balik dari berbagai pihak –terutama dari pemanfaat- untuk merumuskan strategi yang lebih baik untuk keperluan perbaikandi



masa depan. Beberapa rekomendasi berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan jasa pengembangan usaha yaitu:

9. Merumuskan metode pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pelaku yang ada baik di tingkat propinsi sampai ke tingkat Desa. Misalnya metode pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pelaku di tingkat desa dibuat lebih sederhana;
10. Merumuskan ukuran keberhasilan secara jelas pada setiap mekanisme pelaksanaan kegiatan;
11. Merumuskan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan internal program dalam proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan jasa pengembangan usaha tani;
12. Mendesain dan menyediakan dokumen kebijakan dan instrumentasi pendukung (panduan, Form, F.A.Q, dll) berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengembangan usaha (non-fisik) secara transparan dan akuntabel bagi masyarakat Petani.

**Soe, 09 Desember 2009**

Atas Nama,  
Seluruh Partisipan Lokakarya Evaluasi Penyelenggaraan Konsep BDS  
PNPM Agribisnis Perdesaan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Propinsi Nusa Tenggara Timur

